



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah menjadi PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTUR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Denpasar. Pelaksanaan tugas sehari-hari, dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi



3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
 - Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - Sub Bidang Idiologi dan Kewaspadaan Nasional.
4. Bidang Penanganan Konflik.
 - Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial.
 - Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan Kemasyarakatan
5. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik.
 - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
6. Bidang Ketahanan Bangsa dan Masyarakat.
 - Sub Bidang Ketahanan Sosial Sumber Daya Alam dan Ekonomi.
 - Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan.

1.3 ISU STRATEGIS

Upaya kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjawab pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan perilaku berdemokrasi. Berdasarkan data Profil Perkembangan Kota Denpasar diketahui jumlah penduduk pemilih 833.900 jiwa tahun 2014, sedangkan yang terdaftar dalam DPH (daftar pemilih) sebanyak 407.476 jiwa sehingga ada



selisih 426.425 jiwa. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu unsur membangun mental bangsa yang berlandaskan Pancasila. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi sebagai daerah yang sangat terbuka dari berbagai interaksi, baik interaksi individu, kelompok, budaya, agama dan berbagai kepentingan. Kondisi diatas pada hakikatnya mengandung berbagai perbedaan yang menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah pada konflik sosial di masyarakat.

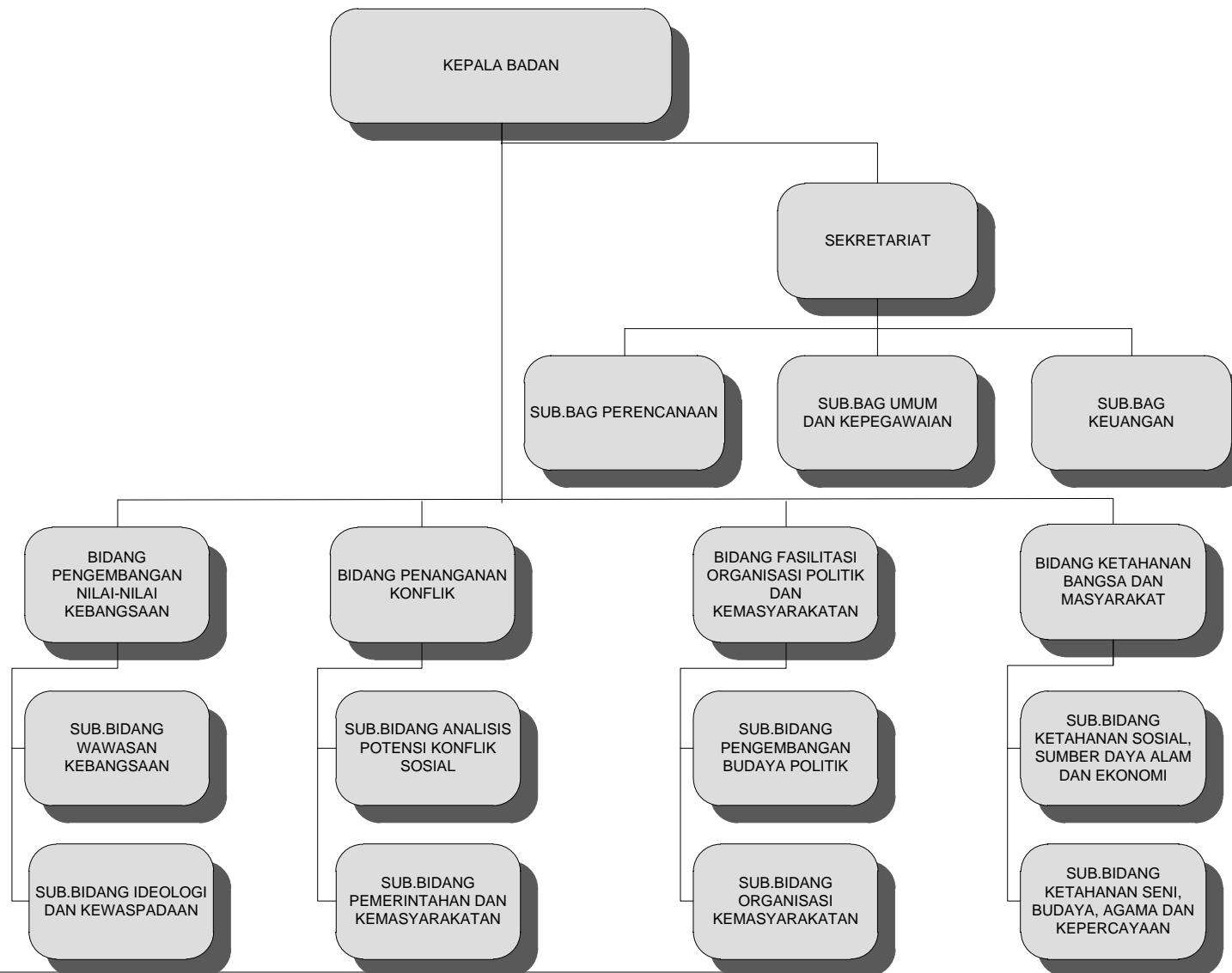
Adapun permasalahan yang masih dihadapi Kota Denpasar dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan politik antara lain: (1) Masih perlunya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, (2) Masih perlunya pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi: peningkatan kesadaran bela Negara, peningkatan koordinasi forum pembauran kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa, sosialisasi wawasan kebangsaan, bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, bintek peningkatan nilai luhur budaya bangsa, (3) Masih perlunya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, seperti: seminar peningkatan wawasan kebangsaan, fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya, seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan, (4) Masih perlunya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) meliputi: penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, penyuluhan berkembangnya praktik prostitusi, penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur, (5) Masih perlunya pendidikan politik masyarakat, meliputi: verifikasi bantuan keuangan parpol. Pendidikan politik pemilih pemula, pemberdayaan kelembagaan parpol, koordinasi forum-forum diskusi politik, pendidikan politik kepada organisasi massa.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Secara kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah ditetapkan dalam Perda Kota Denpasar No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Denpasar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan dengan Dinas/Instansi dan lembaga/satuan kerja terkait yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yaitu



mengantisipasi berbagai kerawanan sosial, politik yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan memiliki visi sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kota Denpasar yang aman, nyaman dan tenram dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya.





1.5 MEKANISME PENULISAN LAPORAN

IKHTISAR EKSEKUTIF Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, isu strategis, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, serta penyampaian struktur organisasi Badan.

BAB II

Menguraikan rencana dan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, meliputi rencana kinerja serta penyampaian Perjanjian Kinerja tahun 2016.

BAB III

Menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja serta analisis pengukuran, hal itu digambarkan dari capaian hasil (*output*) dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, dengan membandingkan hasil yang diperoleh pada tahun 2016 dengan target yang ditetapkan. Hasil analisis akan dapat menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dari kinerja Badan.

BAB IV

Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran untuk dapat mencapai kinerja yang lebih baik.



LAMPIRAN

Berisi lampiran tentang Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).



BAB II

RENCANA DAN TARGET KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2016 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi sekretariat dan masing-masing bidang di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja tahun 2016 ini.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah dengan PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terciptanya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, pengembangan karir yang jelas serta <i>reward</i> dan <i>punishment</i> sesuai kinerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat substantif	8 orang
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali
	Jumlah frekuensi pengamanan kawasan Sanur	12 kali
	Jumlah frekuensi kegiatan pengamanan, frekuensi kegiatan pembinaan, frekuensi koordinasi	12 kali
	Jumlah peserta pelatihan pembekalan Jaringan Deteksi Dini	50 orang
	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman dan pemajuan HAM	50 orang
	Jumlah frekuensi kegiatan Kominda Kota Denpasar	12 kali
	Jumlah frekuensi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 kali
	Jumlah pecalang peserta Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	70 orang
	Jumlah frekuensi kegiatan tim terpadu penanganan konflik sosial	12 kali
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12 kali
	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan	50 orang



	Jumlah frekuensi pelaksanaan apel HUT Pemerintah Kota Denpasar	1 kali
	Jumlah peserta bintek kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	70 orang
	Jumlah peserta Bintek Peningkatan kesadaran bela Negara	70 orang
	Jumlah peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan	75 orang
	Jumlah frekuensi koordinasi forum pembauran kebangsaan dan koordinasi forum kebangsaan desa/lurah se-Kota Denpasar	2 kali
	Jumlah peserta bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama	65 orang
	Jumlah peserta bintek fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya	50 orang
	Jumlah peserta seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi pengikut aliran kepercayaan	50 orang
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	50 orang
	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi	35 orang
	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan eksplorasi anak di bawah umur	35 orang
Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah peserta pendidikan politik bagi organisasi massa	100 orang
	Jumlah peserta forum-forum diskusi politik	60 orang
	Jumlah verifikasi bantuan keuangan partai politik di kota Denpasar	7 partai politik
	Jumlah peserta bintek/pelatihan politik bagi pemilih pemula	200 orang



	Jumlah partai politik pemenang pemilu 2014-2019 yang mengikuti pemberdayaan pemilu	7 partai politik
--	--	------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja diukur melalui pelaksanaan program kegiatan. Untuk capaian kinerja keuangan dari pelaksanaan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dalam 8 (delapan) program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 1 (satu) kegiatan, realisasi keuangan rata-rata sebesar 84,58%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan, realisasi keuangan rata-rata sebesar 88,99%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan, realisasi keuangan rata-rata sebesar 66,09%.
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan 10 (sepuluh) kegiatan, realisasi keuangan rata-rata sebesar 84,46%
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan 8 (delapan) kegiatan, realisasi keuangan rata-rata sebesar 94,03%.
6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan 2 (dua) kegiatan, realisasi keuangan rata-rata sebesar 99,50%
7. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan 3 (tiga) kegiatan, realisasi keuangan sebesar 88,63%.
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan 5 (lima) kegiatan, realisasi keuangan rata-rata 96,91%



Sasaran	Indikator	Target Renstra sampai tahun 2020 (akhir periode Renstra)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2020	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp. (000)
Memperlancar pelaksanaan administrasi perkantoran	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Penyediaan Administrasi Perkantoran	100	7,228,954,900	100	1,370,707,450	84.58	1,159,306,164	29.48	2,130,961,205
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	3,151,530,000	100	480,820,000	88.99	427,866,964	43.87	1,382,471,700
Terciptanya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, pengembangan karir yang jelas serta reward dan punishment sesuai kinerjanya	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur	100	620,000,000	100	80,000,000	66.09	52,872,450	18.47	114,489,250
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Frekuensi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA	100	2,363,960,000	100	77,400,000	98.81	76,480,000	5.70	134,837,500
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Frekuensi Pengamanan Kawasan Sanur	100	817,201,000	100	128,501,000	99.65	128,052,090	29.30	239,449,270



Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Frekuensi Kegiatan Pengamanan, Frekuensi Kegiatan Pembinaan, Frekuensi Koordinasi	100	1,439,687,000	100	135,137,000	89.25	120,607,000	28.46	409,720,000
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah Peserta Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini	100	403,568,000	100	56,068,000	94.69	53,093,000	26.27	106,033,000
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM	100	466,950,000	100	78,450,000	99.04	77,700,000	30.66	143,153,600
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Keamanan Situasi dan Kondisi Kota Denpasar	100	4,088,352,000	100	503,162,000	89.92	452,427,900	20.80	850,230,300
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah Laporan Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	100	1,306,480,000	100	151,390,000	97.69	147,890,000	21.25	277,589,100
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pelatihan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Ormas (Pecalang) di Kota Denpasar	100	967,500,000	100	160,000,000	96.33	154,120,000	30.44	294,545,000



Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah Laporan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	100	2,804,214,600	100	20,352,000	50.37	10,252,000	0.55	15,285,000
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Denpasar	100	5,920,000,000	100	204,705,000	28.92	59,205,000	1.00	59,205,000
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Frekuensi Kegiatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	100	2,377,304,600	100	369,126,000	87.51	323,033,250	13.59	323,033,250
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100	163,478,850	100	27,335,000	98.72	26,985,000	30.55	49,950,000
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Frekuensi Pelaksanaan Apel HUT Pemerintah Kota Denpasar	100	1,760,267,350	100	279,305,864	99.51	277,946,409	30.38	534,683,909



Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	100	300,790,260	100	52,464,600	98.86	51,864,600	34.88	104,923,600
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kesadaran Bela Negara	100	444,080,000	100	80,080,000	96.52	77,290,000	31.71	140,802,000
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Peserta Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100	343,639,400	100	61,674,000	99.03	61,074,000	32.35	111,179,000
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Frekuensi Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Koordinasi Forum Kebangsaan Desa/Lurah se-Kota Denpasar	100	1,263,657,550	100	178,804,500	74.75	133,659,100	46.67	589,708,745
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	100	315,518,870	100	45,832,700	97.38	44,632,700	26.30	82,983,200



Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi terhadap Pelestarian Ketahanan Kreasi Seni dan Budaya	100	505,700,000	100	77,200,000	99.55	76,850,000	15.20	78,850,000
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah Peserta Seminar Peningkatan Ketahanan bagi Penganut Aliran Kepercayaan	100	420,695,000	100	65,050,000	99.46	64,700,000	15.38	64,700,000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	100	444,900,000	100	76,900,000	96.62	74,300,000	16.70	74,300.000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	100	403,310,000	100	35,310,000	83.72	29,560,000	7.33	29,560,000
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Eksplorasi Anak Bawah Umur	100	402,610,000	100	34,610,000	85.55	29,610,000	7.35	29,610,000
Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Politik kepada Organisasi Massa	100	401,500,000	100	55,000,000	97.73	53,750,000	20.09	80,665,000



Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah Peserta Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	100	259,500,000	100	35,000,000	98.57	34,500,000	19.93	51,707,500
Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Denpasar	100	477,500,000	100	24,000,000	88.28	21,186,000	7.35	35,091,000
Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah Peserta Kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kota Denpasar	100	310,500,000	100	45,000,000	100	45,000,000	23.50	72,982,500
Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah Parpol Pemenang Pemilu 2014-2019 yang mengikuti Pemberdayaan Parpol	100	652,500,000	100	100,000,000	99.98	99,981,000	15.32	99,981,000



3.2 Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja merupakan penilaian pencapaian yang menunjang keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun permasalahan dan solusi kegiatan sebagai berikut :

Permasalahan

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2016 Rp 1.370.707.449,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 1.159.306.164,- (84,58%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 211.401286,- yang disebabkan oleh :
 - Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja ATK, Alat Listri dan Elektronik, Perangko, Materai dan Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Aci-Aci dan Sesajen, Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah, Jasa Tenaga Non Pegawai, Cetak, Fotocopy, Makmin Rapat dan Tamu.
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan sisa anggaran Rp 153.941.980,- dikarenakan tidak terlaksananya kunjungan keluar daerah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB) dimana dana perjalanan dinas disiapkan untuk pendampingan.
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2016 Rp 480.820.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 427.866.964,- (88,99%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 52.953.036,- yang disebabkan oleh :
 - Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja BHP Frekuensi Radio, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM/Gas dan Pelumas, STNK, Pemeliharaan Peralatan Kantor, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi, Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan, Pemeliharaan Buku/Perpustakaan, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan AC dan Kursi Kerja.
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2016 Rp 80.000.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 52.872.450,- (66,09%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 27.127.550,- yang disebabkan oleh :



- Karena memang tidak ada undangan bimtek yang terkait Kesbangpol sehingga masih ada sisa anggaran.
4. Kegiatan Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 135.137.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 120.607.000,- (89,25%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 14.530.000,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran pada Belanja ATK, Jasa Tenaga Non Pegawai (Honor Tim Pengamanan) yang dianggarkan untuk 24 orang terealisasi hanya 23 orang, Makmin Rapat, dan Makmin Pengamanan dikarenakan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat.
5. Kegiatan Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 56.068.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 53.093.000,- (94,69%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 2.975.000,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran dari selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja ATK, Jasa Publikasi, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Penggandaan, dan Pakaian Kerja Lapangan.
6. Kegiatan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 503.162.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 452.427.900,- (89,92%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 50.734.100,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja ATK, Jasa Transportasi dan Akomodasi, Makmin Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah.
7. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 20.352.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 10.252.000,- (50,37%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 10.100.000,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja ATK dan Makmin Rapat oleh karena tidak semua anggota tim hadir pada waktu rapat persiapan dan penyusunan laporan rencana aksi.
8. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Denpasar jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 204.705.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 59.205.000,- (28,92%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 145.500.000,- yang disebabkan oleh :



- Belanja Honor Tim/Petugas Khusus tidak terealisasi dikarenakan pada saat pelaksanaan Sarasehan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi tidak memberikan materi secara langsung tetapi hanya diwakilkan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara Pimpinan Daerah yang termasuk didalam Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Denpasar sehingga ada sedikit permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas tim sesuai dengan SK Nomor : 188.45/1261/HK/2016.
9. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2016 Rp 369.126.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 323.033.250,- (87,51%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 46.092.750,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja ATK, Jasa Tenaga Non Pegawai, Transportasi dan Akomodasi, Dokumentasi, Makmin Rapat, dan Belanja Pakaian Batik Tradisional.
10. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan jumlah anggaran kegiatan untuk tahun 2016 Rp 178.804.500,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 133.659.100,- (74,75%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 45.145.400,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran dan selisih pagu dengan dana yang terealisasi pada Belanja ATK, Jasa Publikasi, Penggandaan, Makmin Rapat, Makmin Bimtek/Pelatihan, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olahraga, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
11. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 35.310.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 29.560.000,- (83,72%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 5.750.000,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran pada Belanja Jasa Publikasi dimana dari Liputan TV tidak datang pada saat kegiatan dan pada Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tidak terealisasi dikarenakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan sehingga honor tidak terpakai.
12. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Eksloitasi Anak Bawah Umur jumlah anggaran untuk tahun 2016 Rp 34.610.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 29.610.000,- (85,55%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 5.000.000,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran pada Belanja Jasa Publikasi dimana dari Liputan TV tidak datang pada saat kegiatan dan pada Belanja Jasa Tenaga



Ahli/Instruktur/Narasumber tidak terealisasi dikarenakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan sehingga honor tidak terpakai.

13. Kegiatan Verifikasi Bantuan Partai Politik jumlah anggaran tahun 2016 Rp 24.000.000,- sedangkan realisasi dalam setahun mencapai Rp 21.186.000,- (88,28%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 2.814.000,- yang disebabkan oleh :
- Adanya sisa anggaran dari selisih pagu dengan dana yang sudah terealisasi pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Solusi

1. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan.
2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial akan disesuaikan dan dievaluasi lagi dalam penganggarannya, sehingga rapat-rapat persiapan dan penyusunan laporan rencana aksi bisa digunakan sampai 100%.
3. Kegiatan Verifikasi Bantuan Partai Politik, diharapkan kedepannya agar pengumpulan persyaratan berkas bantuan keuangan Partai Politik dari tahun ke tahun bisa terus ditingkatkan dan Anggota Tim Verifikasi Partai Politik bisa bekerja semaksimal mungkin sehingga SPJ Parpol tepat waktu.
4. Peningkatan koordinasi dengan tim Kominda, FKDM, tim Koordinasi dan Sinkronisasi, serta FPK agar terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Denpasar.



BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja anggaran tahun 2016 dengan pelaksanaan 8 program dan 31 kegiatan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, target kinerja program/kegiatan :
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disebabkan oleh tidak adanya undangan bimtek yang terkait Kesbangpol sehingga masih ada sisa anggaran. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya sisa anggaran pada Belanja Makanan Minuman Rapat dan Kegiatan Peningkatan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya sisa anggaran pada Belanja Jasa Publikasi dan Makanan Minuman Rapat serta adanya selisih pagu dengan dana yang terealisasi.
 - Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Denpasar disebabkan Belanja Honor Tim/Petugas Khusus tidak terealisasi dikarenakan pada saat pelaksanaan Sarasehan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi tidak memberikan materi secara langsung tetapi hanya diwakilkan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara Pimpinan Daerah yang termasuk didalam Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Denpasar sehingga ada sedikit permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas tim sesuai dengan SK Nomor: 188.45/1261/HK/2016.
- b. Secara umum 8 sasaran dengan 31 kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan mencapai realisasi kinerja yang baik.

4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan simpulan diatas maka untuk pelaksanaan kinerja yang lebih baik lagi maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja untuk sasaran yang telah dapat dilaksanakan agar ditingkatkan lagi kinerjanya, khususnya untuk sasaran yang realisasinya masih rendah.



- b. Untuk kegiatan yang belum dapat dipenuhi target sasarannya dan tidak mencapai realisasi diperlukan upaya lebih lanjut agar pencapaian sasaran dapat dilaksanakan pada tahun mendatang.
- c. Dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya agar berpedoman pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya sehingga kinerja dapat ditingkatkan lagi.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. I Komang Sugiarta, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE., M.Si.

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 01 Maret 2016

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Denpasar

ttd

ttd

Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE., M.Si.

Drs. I Komang Sugiarta M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611231 199003 1 126



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terciptanya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, pengembangan karir yang jelas serta <i>reward</i> dan <i>punishment</i> sesuai kinerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat substantif	8 orang
Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah dengan non lembaga pemerintah	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali
	Jumlah frekuensi pengamanan kawasan Sanur	12 kali
	Jumlah frekuensi kegiatan pengamanan, frekuensi kegiatan pembinaan, frekuensi koordinasi	12 kali
	Jumlah peserta pelatihan pembekalan Jaringan Deteksi Dini	50 orang
	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman dan pemajuan HAM	50 orang
	Jumlah frekuensi kegiatan Kominda Kota Denpasar	12 kali
	Jumlah frekuensi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 kali
	Jumlah pecalang peserta Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	70 orang
	Jumlah frekuensi kegiatan tim terpadu penanganan konflik sosial	12 kali
Meningkatnya pelaksanaan dan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Denpasar	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12 kali
	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan	50 orang
	Jumlah frekuensi pelaksanaan apel HUT Pemerintah Kota Denpasar	1 kali
	Jumlah peserta bintek kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	70 orang



	Jumlah peserta Bintek Peningkatan kesadaran bela Negara	70 orang
	Jumlah peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan	75 orang
	Jumlah frekuensi koordinasi forum pembauran kebangsaan dan koordinasi forum kebangsaan desa/lurah se-Kota Denpasar	2 kali
	Jumlah peserta bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama	65 orang
	Jumlah peserta bintek fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya	50 orang
	Jumlah peserta seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan	50 orang
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	50 orang
	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi	35 orang
	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan eksplorasi anak di bawah umur	35 orang
Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah peserta pendidikan politik bagi organisasi massa	100 orang
	Jumlah peserta forum-forum diskusi politik	60 orang
	Jumlah verifikasi bantuan keuangan partai politik di kota Denpasar	7 partai politik
	Jumlah peserta bintek/pelatihan politik bagi pemilih pemula	200 orang
	Jumlah partai politik pemenang pemilu 2014-2019 yang mengikuti pemberdayaan pemilu	7 partai politik



Program	Anggaran	Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp1.120.269.850	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp402.490.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp80.000.000	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp1.763.840.000	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp1.157.930.300	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp142.250.000	
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Rp146.820.000	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp283.000.000	
Jumlah Anggaran	Rp5.096.600.150	

Denpasar, 01 Maret 2016

Walikota Denpasar,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

ttd

ttd

Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra,
SE.,M.Si

Drs. I Komang Sugiarta, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 199003 1 126



PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2016
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Terwujudnya manajemen dan akutabilitas Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat substantif	8 orang	8 orang	100%
2	Terwujudnya stabilitas keamanan lingkungan Kota Denpasar	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali	30 kali	100%
		Jumlah frekuensi pengamanan kawasan Sanur	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah frekuensi kegiatan pengamanan, frekuensi kegiatan pembinaan, frekuensi koordinasi	12 kali	12 kali	100%
		Jumlah peserta pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini	50 orang	50 orang	100%
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman dan pemajuan HAM	50 orang	50 orang	100%
		Jumlah frekuensi kegiatan Kominda Kota Denpasar	12 kali	12 kali	100%
		Jumlah frekuensi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah pecalang peserta pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	70 orang	70 orang	100%
		Jumlah frekuensi kegiatan tim terpadu penanganan konflik sosial	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar	2 kali	2 kali	100%
3	Terwujudnya rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam	12 bulan	12 bulan	100%



		kehidupan beragama			
		Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan	50 orang	50 orang	100%
		Jumlah frekuensi pelaksanaan apel HUT Pemerintah Kota Denpasar	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah peserta bintek kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	70 orang	70 orang	100%
		Jumlah peserta Bintek Peningkatan kesadaran bela Negara	70 orang	70 orang	100%
		Jumlah peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan	75 orang	75 orang	100%
		Jumlah frekuensi koordinasi forum pembauran kebangsaan dan koordinasi forum kebangsaan desa/lurah se-Kota Denpasar	2 kali	2 kali	100%
		Jumlah peserta bintek peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama	65 orang	65 orang	100%
4	Terwujudnya hubungan keharmonisan antara Pemerintah dengan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kota Denpasar	Jumlah peserta bintek fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya	50 orang	50 orang	100%
		Jumlah peserta seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan	50 orang	50 orang	100%
5	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	50 orang	50 orang	100%
		Jumlah peserta penyuluhan pencegahan perkembangan praktik prostitusi	35 orang	35 orang	100%



		Jumlah peserta penyuluhan pencegahan eksplorasi anak di bawah umur	35 orang	35 orang	100%
6	Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah peserta pendidikan politik bagi organisasi massa	100 orang	100 orang	100%
		Jumlah peserta forum-forum diskusi politik	60 orang	60 orang	100%
		Jumlah tim verifikasi bantuan keuangan parpol di Kota Denpasar	7 partai politik	7 partai politik	100%
		Jumlah peserta bintek/pelatihan politik bagi pemilih pemula	200 orang	200 orang	100%
		Jumlah partai politik pemenang pemilu 2014-2019 yang mengikuti pemberdayaan pemilu	7 partai politik	7 partai politik	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Rp. 5.089.385.114

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Rp. 4.445.794.627

Denpasar, 30 Desember 2016

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Drs. I Komang Sugiarta, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611231 199003 1 126



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya manajemen dan akutabilitas Pemerintah Kota Denpasar	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat substantif	8 orang
2	Terwujudnya stabilitas keamanan lingkungan Kota Denpasar	Jumlah frekuensi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	30 kali
		Jumlah frekuensi pengamanan kawasan Sanur	12 bulan
		Jumlah frekuensi kegiatan pengamanan, frekuensi kegiatan pembinaan, frekuensi koordinasi	12 kali
		Jumlah peserta pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini	50 orang
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman dan pemajuan HAM	50 orang
		Jumlah frekuensi kegiatan Kominda Kota Denpasar	12 kali
		Jumlah frekuensi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12 bulan
		Jumlah pecalang peserta pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	70 orang
		Jumlah frekuensi kegiatan tim terpadu penanganan konflik sosial	12 bulan
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar	2 kali
		Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	12 bulan
		Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan	50 orang



3	Terwujudnya rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara	Jumlah frekuensi pelaksanaan apel HUT Pemerintah Kota Denpasar	1 kali
		Jumlah peserta bintek kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	70 orang
		Jumlah peserta Bintek Peningkatan kesadaran bela Negara	70 orang
		Jumlah peserta seminar peningkatan wawasan kebangsaan	75 orang
		Jumlah frekuensi koordinasi forum pembauran kebangsaan dan koordinasi forum kebangsaan desa/lurah se-Kota Denpasar	2 kali
4	Terwujudnya hubungan keharmonis antara Pemerintah dengan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kota Denpasar	Jumlah peserta bintek fasilitasi terhadap pelestarian ketahanan kreasi seni dan budaya	50 orang
		Jumlah peserta seminar peningkatan ketahanan kebangsaan bagi penganut aliran kepercayaan	50 orang
5	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	50 orang
		Jumlah peserta penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi	35 orang
		Jumlah peserta penyuluhan pencegahan eksplorasi anak di bawah umur	35 orang
6	Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masyarakat dan partai politik daerah	Jumlah peserta pendidikan politik bagi organisasi massa	100 orang
		Jumlah peserta forum-forum diskusi politik	60 orang
		Jumlah verifikasi bantuan keuangan partai politik di kota Denpasar	7 partai politik
		Jumlah peserta bintek/pelatihan politik bagi pemilih pemula	200 orang



	Jumlah partai politik pemenang pemilu 2014-2019 yang mengikuti pemberdayaan pemilu	7 partai politik
--	--	------------------

Denpasar, 05 Oktober 2015
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

Drs. I Komang Sugiarta, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 199003 1 126



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR
PERIODE 2016 - 2021**

Tugas Pokok :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
4. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6



Meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan Kota Denpasar	- Jumlah tim Kominda yang berkoordinasi dalam pelaksanaan intelijensi	- Demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kominda perlu adanya tim Kominda untuk berkoordinasi terkait tugas-tugas tersebut	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Penanganan Konflik	
	- Jumlah wilayah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi WNA	- Bagi WNA yang ada/berkunjung ke Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Denpasar perlu dijamin keamanannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Ketahanan bangsa dan Masyarakat	
	- Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman dan pemajuan HAM	- Pemahaman terhadap HAM kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi/seminar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Ketahanan bangsa dan Masyarakat	
	- Jumlah tim pemantauan pengamanan kawasan Sanur	- Sanur merupakan salah satu obyek wisata, baik domestik maupun mancanegara, keamanannya perlu terus dijaga	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Penanganan Konflik	
	- Jumlah tim pengamanan Kota Denpasar yang melaksanakan koordinasi	- Denpasar disamping sebagai Ibu Kota Provinsi, obyek wisata dan banyak lagi kegiatan lainnya, pengamanannya perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak keamanan yang terkait	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	- Laporan Bidang Penanganan Konflik	



	<p>- Jumlah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di tingkat desa/kelurahan</p>	<p>- Untuk penanganan keamanan di Kota Denpasar sampai ke tingkat paling bawah (desa/kelurahan) perlu dibuatkan Forum Kewaspadaan Dini, dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul secara mendadak.</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar</p>	<p>- Laporan Bidang Penanganan Konflik</p>	
--	--	--	--	--	--

Denpasar, Januari 2016
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

Drs. I Komang Sugiarta, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19611231 199003 1 126